LAPORAN TAHUNAN
ITJENTAN
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern dilingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada:(a) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (b) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hal itu, Inspektorat Jenderal dituntut untuk menjadi contoh oleh Eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Pertanian serta terus meningkatkan kapasitas pengawasan intern. Pelaksanan pengawasan intern

oleh Inspektorat Jenderal disajikan dalam Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2019 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dalam upaya memastikan terlaksananya program dam kegiatan berjalan dengan baik serta sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

1. STRUKTUR ORGANISASI

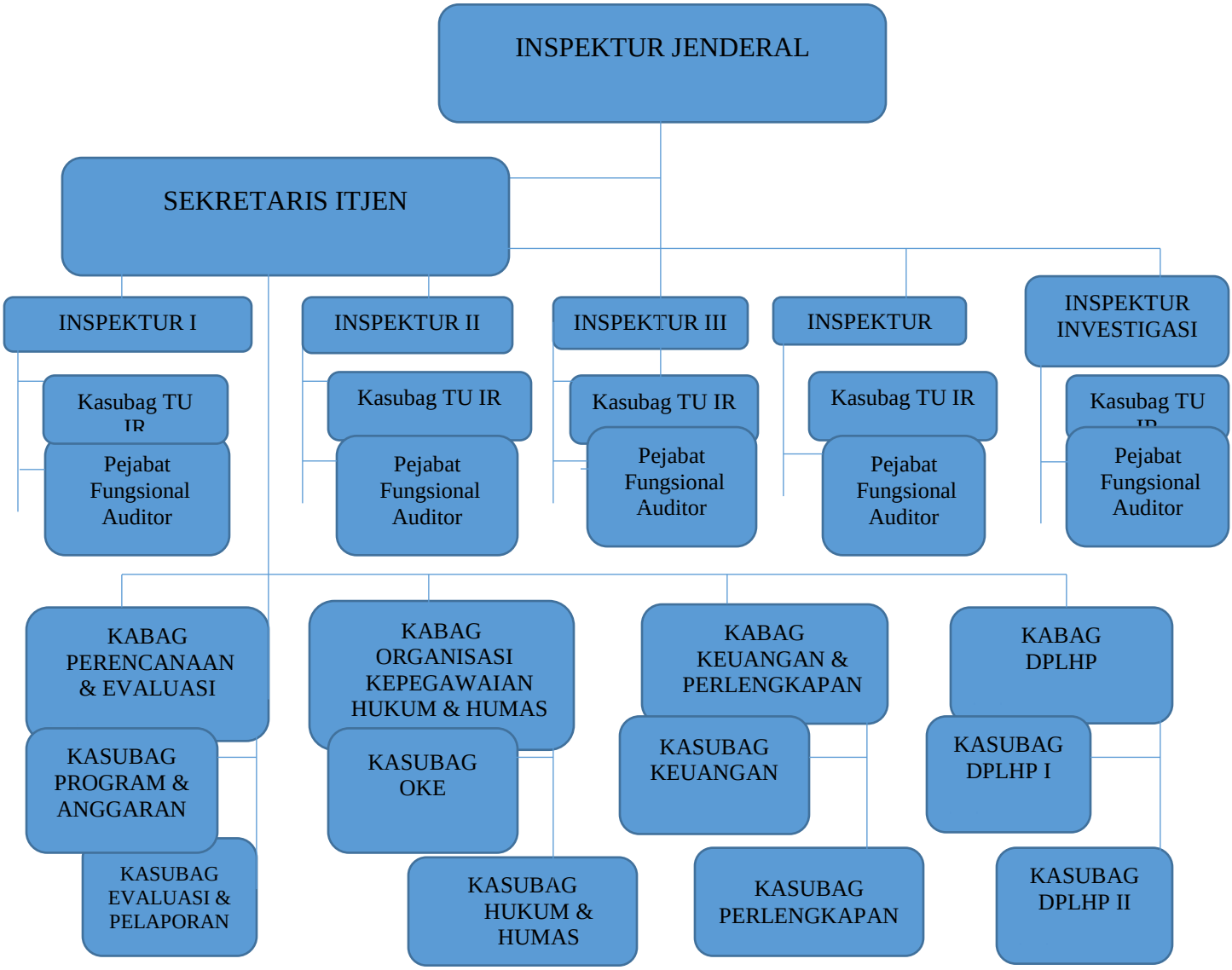

2. KEPEGAWAIAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan Desember 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 302 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

Pejabat Struktural		**24 orang**
1	Eselon I	1 orang
2	Eselon II	6 orang
3	Eselon III	4 orang
4	Eselon IV	13 orang
Pejabat Fungsional Auditor		**190 orang**
1	Auditor Utama	12 orang
2	Auditor Madya	71 orang
3	Auditor Muda	38 orang
4	Auditor Pertama	25 orang
5	Calon Auditor	44 orang
Pejabat Fungsional Tertentu		**14 orang**
1	Analis Kepegawaian Pertama	1 orang
2	Analis Kepegwaian Penyelia	1 orang
3	Analis Kepegawaian Muda	2 orang
4	Perencana Muda	2 orang
5	Perencana Pertama	1 orang
6	Arsiparis Pertama	3 orang
7	Arsiparis Mahir	1 orang
8	Arsiparis Pelaksana	1 orang
9	Pranata Humas Muda	1 orang
10	Pranata Humas Pertama	1 orang
Pejabat Atase Pertanian		**1 orang**
Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)		**73 orang**

b. Berdasarkan Klasifikasi Golongan

Pegawai Berdasarkan Golongan		**302 orang**
1	Golongan IV	104 orang
2	Golongan III	181 orang
3	Golongan II	17 orang
4	Golongan I	0 orang

c. Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		**302 orang**
1	S3	3 orang
2	S2	134 orang
3	S1	130 orang
4	D4	0 orang
5	D3	5 orang
6	SLTA	27 orang
7	SLTP	2 orang
8	SD	1 orang

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		**302 orang**
1	Pria	171 orang
2	Wanita	131 orang

e. Berdasarkan Agama

Pegawai Berdasarkan Agama		**302**	**orang**
1	Islam	268	orang
2	Protestan	25	orang
3	Katholik	8	orang
4	Hindu	1	orang

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019.

VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Itjen 2015 – 2019, visi Inspektorat Jenderal adalah ***"Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"***.

Dengan visi tersebut, diharapkan akan memberikan inspirasi, merubah perilaku, dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjadi teladan dan mampu berperan menjadi mitra kerja pro-aktif bagi pengelola program pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
3. Meningkatkan kapasitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementan

1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun

fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern dilingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu ataspenugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada: a) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; b) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat watchdog atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat consulting partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapai auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

2. Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan intern yang lebih kearah/bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif.Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai Quality Assurance dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan;
b. Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
c. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

3. Kebijakan Inspektorat Jenderal

a. Kebijakan Umum

Dalam rangka pencapaian program kedaulatan pangan, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan umum pengawasan intern sebagai berikut:

1) Reformulasi Pengawasan Intern

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit, baik untuk kegiatan pengawalan (konsultasi dan asistensi) maupun *assurance*. Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan

untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian, pencapaian kedaulatan pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) dan pembangunan pertanian melalui peran sebagai pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (*early warning system*) dengan pendekatan perubahan proses bisnis pengawasan intern.

2) Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

   Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal melalui penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran

   Inspektorat Jenderal melaksanakan proram peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan dokumen anggaran melalui: (a) pemantauan/*monitoring* dan asistensi penyusunan laporan keuangan; (b) reviu laporan keuangan; (c) penertiban Barang Milik Negara (BMN); (d) pengawalan/pendampingan dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK; dan (e) reviu rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-K/L).

4) Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP Kementerian dan eselon I Inspektorat Jenderal melaksanakan: (a) pemantauan (monitoring) dan asistensi penyusunan SAKIP; (b) evaluasi SAKIP Eselon I; dan (c) pengawalan/pendampingan (monitoring) hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPan dan Reformasi Birokrasi.

5) Maturitas Penyelenggaraan SPIP

   Dalam rangka meningkatkan maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai

dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi penerapan (implementasi) pada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian maupun satuan kerja (Satker) provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian. Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: pembinaan, pengawasan dan apresiasi guna mendorong implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, melalui penanganan risiko (*enterprise risk management*) kegiatan operasional maupun organisasional melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan standar operasional prosedur yang memadai.

6) Pembinaan Tekad Antikorupsi

   Dalam rangka membangun Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kementerian Pertanian sesuai amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 dan Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Instansi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta PermenPan & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

7) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

   Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengawasan bagi masyarakat (*stakeholder*), maka Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian melalui peningkatan *leveling Internal Audit Capability Model* (*IACM*).

b. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Daging, Gula, Bawang Merah, Cabai dan Kakao), melalui peningkatan pengawasan pada Satuan Kerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada:

1) Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebagai penanggung jawab Inspektorat I;
2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; sebagai penanggung jawab Inspektorat II.
3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Litbang Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat III;
4) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat IV;
5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, pencegahan dan pemberantasan korupsi, maturitas SPIP,serta Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) pada satker lingkup Kementerian Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat Investigasi.

Adapun kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang diarahkan pada:

1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
2) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang sesuai Sistem

Akuntansi Pemerintah (SAP); 3) Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP); 4) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern; 5) Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui *Whistle Blowing System/WBS*; 6) Unit Penanganan Gratifikasi (UPG); dan 7) Pembangunan agen-agen perubahan *Agent of Change* (*role model*).

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kementerian Pertanian telah mengembangkan aplikasi e-SAKIP yang didalamnya termasuk aplikasi e-PK yaitu pengelolaan kinerja secara elektronik. Adapun fungsinya adalah sebagai alat bantu dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan target dan capaian Indikator Kinerja serta melengkapi komponen penilaian e-SAKIP. Berikut ini Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementan tahun 2019:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	16.68 nilai

	kewenangan Inspektorat Jenderal	Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	100.00 %
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	90.00 %
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	90.00 %
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	3.00 nilai
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	3.00 nilai
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	85.00 nilai
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	96.50 nilai

Keragaan Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	10.330.450,000
2	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.222.550.000
3	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	10.012.170.000
4	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Keswan, Badan Karantina Pertanian	9.949.380.000

5	Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	10.182.360.000
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	43.439.351.000
Jumlah		**94.136.261.000**

BAB III

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN KEGIATAN

A. KINERJA ANGGARAN ITJENTAN

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp89.993.635.679,00 atau 95,60% dari pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp94.136.261.000,00 dengan capaian fisik sebesar 110,7%. Realisasi anggaran berdasarkan Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2019 Lingkup Sekretariat dan Inspektorat

No	UNIT KERJA	ANGGARAN									
		PAGU	TARGET BULAN INI		TARGET s/d BULAN INI		REALISASI BULAN INI		REALISASI s/d BULAN INI		KINERJA
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	%
01	02	03	04		05		06		07		08
	ITJEN	**94.136.261.000**	**6.343.145.130**	**6,74**	**94.136.261.000**	**100,00**	**9.105.671.989**	**9,67**	**89.993.635.679**	**95,60**	**95,60**
1	IR I	10.330.450.000	869.769.000	8,42	10.330.450.000	100,00	920.475.110	8,91	9.908.777.925	95,92	95,92
2	IR II	10.222.550.000	631.780.667	6,18	10.222.550.000	100,00	301.602.472	2,95	9.994.543.235	97,77	97,77
3	IR III	10.012.170.000	677.020.100	6,76	10.012.170.000	100,00	1.178.891.518	11,77	9.388.484.370	93,77	93,77
4	IR IV	9.949.380.000	326.483.280	3,28	9.949.380.000	100,00	345.705.403	3,47	9.714.768.663	97,64	97,64
5	IR INVES	10.182.360.000	616.560.583	6,06	10.182.360.000	100,00	873.137.310	8,57	9.559.897.632	93,89	93,89
6	SET ITJEN	43.439.351.000	3.221.531.500	7,42	43.439.351.000	100,00	5.485.860.176	12,63	41.427.163.854	95,37	95,37

Sumber data dari Bagian Keuangan

Tabel 2. Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Kementan per Bulan

Bulan	Target				Realisasi			
	Bulanan		Kumulatif		Bulanan		Kumulatif	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
JAN	6.819.387.530	7,24	6.819.387.530	7,24	2.463.242.120	2,62	2.463.242.120	2,62
FEB	7.703.695.280	8,18	14.523.082.811	15,43	7.675.043.037	8,15	10.138.285.157	10,77
MARET	11.050.063.664	11,74	25.573.146.474	27,17	5.948.387.778	6,32	16.086.672.935	17,09
APRIL	8.754.001.080	9,30	34.327.147.555	36,47	8.455.917.382	8,98	24.542.590.317	26,07
MEI	5.660.976.914	6,01	39.988.124.468	42,48	11.214.744.222	11,91	35.757.334.539	37,98
JUN	7.538.374.700	8,01	47.526.499.168	50,49	5.676.127.504	6,03	41.433.462.043	44,01
JULI	10.239.817.980	10,88	57.766.317.148	61,36	7.582.682.088	8,06	49.016.144.131	52,07
AGUS	7.613.917.114	8,09	65.380.234.262	69,45	6.412.361.358	6,81	55.428.505.489	58,88
SEPT	7.143.147.780	7,59	72.523.382.042	77,04	7.358.145.861	7,82	62.786.651.350	66,70
OKT	8.758.224.364	9,30	81.281.606.406	86,34	9.928.522.484	10,55	72.715.173.834	77,24
NOP	6.511.509.464	6,92	87.793.115.870	93,26	8.172.789.856	8,68	80.887.963.690	85,93
DES	6.343.145.130	6,74	94.136.261.000	100,00	9.105.671.989	9,67	89.993.635.679	95,60
TOTAL	**94.136.261.000**							

**Sumber data dari Bagian Keuangan*

Gambar 1.
Perkembangan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019

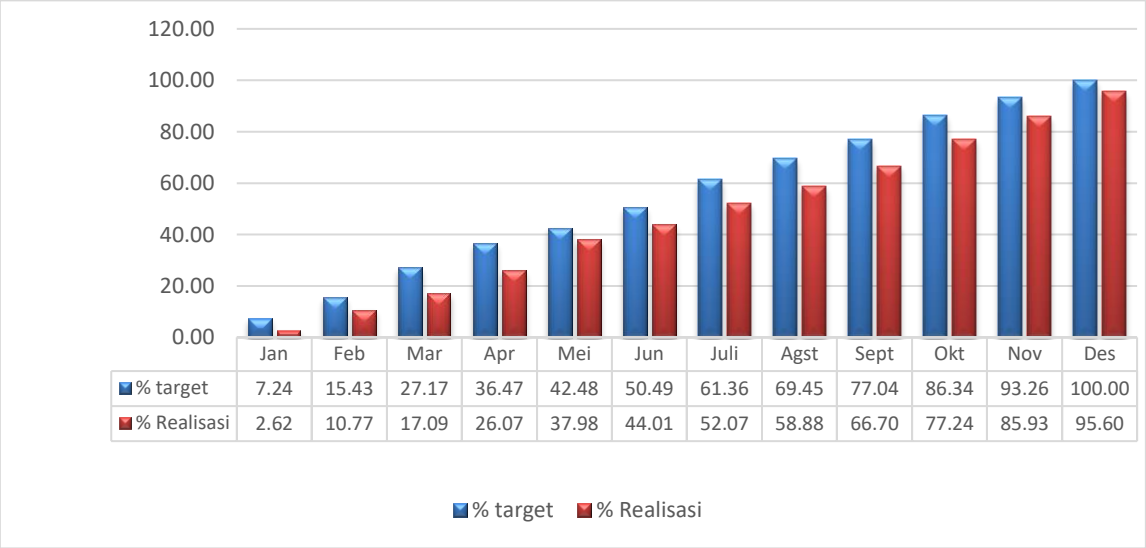

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa realisasi anggaran secara kumulatif antara target dan realisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang diikuti dengan realisasi anggaran masih belum sesuai dengan target.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2019 sebesar Rp94.136.261.000,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Rp	Sisa Pagu	(%) REAL. THD PAGU
1	2	3	4	5	6
018.02.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN**	**94.136.261.000**	**89.993.635.679**	**4.142.477.543**	**95,60**
51	Belanja Pegawai	23.022.873.000	22.665.362.710	357.510.290	98,45
52	Belanja Barang	68.113.388.000	64.501.036.770	3.612.203.452	94,70
53	Belanja Modal	3.000.000.000	2.827.236.199	172.763.801	94,24

Sumber data dari Bagian Keuangan

B. KINERJA KEGIATAN ITJENTAN

1. Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2019 dengan realisasi anggaran sebesar Rp89.993.635.679,00 atau 95,60%. Beberapa capaian kinerja kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Audit (meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang Jasa/PBJ, Audit Barang Milik Negara/BMN, Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu); 2) Pengawalan Sistem Pengendalian Intern kegiatan; 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Eselon I dan Reviu SAKIP Kementerian; 4) Reviu Laporan Keuangan Kementerian dan Eselon I serta Reviu RKAKL Eselon I; 5) Evaluasi Program/Strategis; 6) Pengawasan Lainnya; 7) Pendampingan Workshop Penyusunan LK Eselon I; 8) Pengawasan dan Pendampingan

dalam rangka Swasembada Pangan/UPSUS dan SIWAB; 9) Pemantauan dan Tindak Lanjut Temuan Itjen, BPKP dan BPK, 10) Pembinaan/Penilaian/Asessment Maturitas SPIP; 11) Pembinaan/penilaian mandiri (*self asessment*) pembangunan ZI- WBK/WBBM, 12) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Berikut progres perkembangan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran1.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting jasa sebagai upaya memenuhi kekurangan akan kebutuhan sarana kerja, maupun untuk mengganti sarana kerja yang sudah tidak layak pakai. Berikut adalah sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengalami perkembangan tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 2.

3. Monitoring Penerbitan Laporan

Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2019 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS.

Tabel 4. Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2019

ESELON II	Jumlah PP	Target Laporan	LAPORAN TERBIT				LAPORAN BELUM TERBIT			
			Laporan Terbit	%	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Terbit	%	Masuk Masa KK	Terlambat
Sekretariat										
1. Bagian Perencanaan	255	255	255	100,00	211	44	0	0,00	0	0
2. Bagian Keuangan & Perlengkapan	246	246	246	100,00	234	12	0	0,00	0	0
3. Bagian OKHH	295	295	295	100,00	242	53	0	0,00	0	0
4. Bagian DPLHP	140	140	140	100,00	127	13	0	0,00	0	0
5. Irjen	72	72	46	63,89	38	8	26	36,11	0	26
6. Sekretaris	69	69	62	89,86	55	7	7	10,14	0	7
Jumlah	**1077**	**1077**	**1044**	**96,94**	**907**	**137**	**33**	**3,06**	**0**	**33**
Inspektorat										
1. Inspektorat I	560	560	560	100,00	430	130	0	0,00	0	0
2. Inspektorat II	544	544	543	99,82	371	172	1	0,18	0	1
3. Inspektorat III	464	464	461	99,35	243	218	3	0,65	0	3
4. Inspektorat IV	411	411	409	99,51	349	60	2	0,49	0	2
5. Inspektorat Investigasi	505	505	502	99,41	425	77	3	0,59	0	3
Jumlah	2484	2484	2475	99,64	1818	657	9	0,36	0	9
Total	***3.561***	***3.561***	***3.519***	***98,82***	***2.725***	***794***	***42***	***1,18***	***0***	***42***

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019 (posisi 31 Des 2019)

Gambar 2.
Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2019

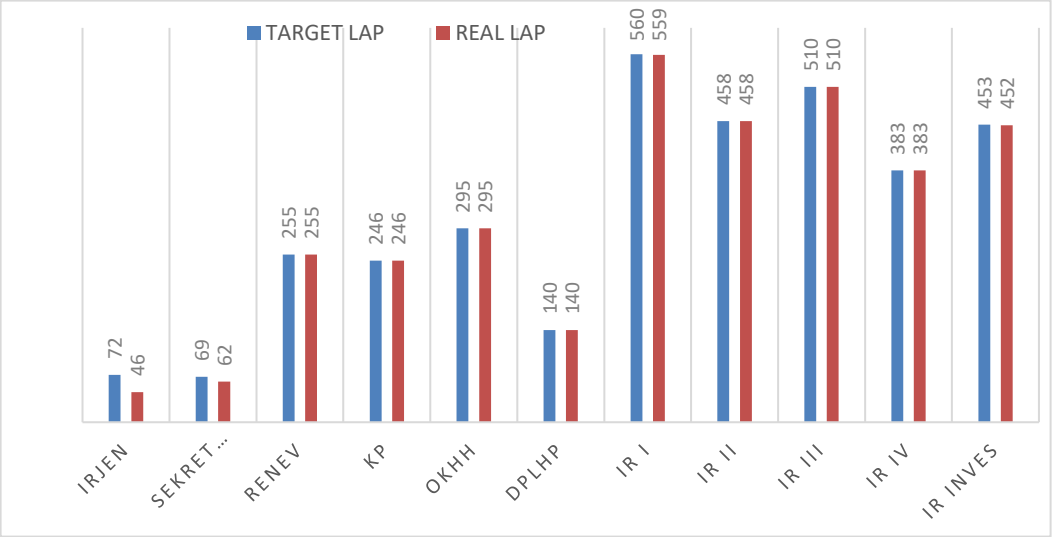

Sampai dengan 31 Desember 2019 laporan yang belum terbit/belum selesai di bagian Sekretariat masih terdapat 33 laporan, sedangkan di bagian Inspektorat Jenderal masih terdapat 9 laporan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Semester I tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, pada unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:

Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, pengawalan, evaluasi, reviu, pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I, pengawasan dan pendampingan dalam rangka swasembada pangan/UPSUS dan kegiatan pengawasan lainnya dan pemantauan dan tindak lanjut.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.908.777.925,00 atau 95,92% dari pagu sebesar 10.330.450.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 349 rekomendasi dan tercapai sebanyak 368 rekomendasi (105,44%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat I meliputi:

1. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah dan untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran dari kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performence* audit) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi: ekonomis, efisien dan efektifitas. Dengan memperhatikan hal tersebut maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi,

prosedur kerja, sistem informasi, pelaporan keuangan dan kegiatan. Audit Kinerja meliputi Audit Ketaatan/Kepatuhan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Audit Pelayanan, Audit Barang Milik Negara, Audit Tindak lanjut Atas Hasil Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Negara.

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat I telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp3.360.840.987,00 atau 99,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.392.864.000,00 sedangkan target rekomendasi sebanyak 144 rekomendasi dan tercapai sebanyak 147 rekomendasi (102,08%). Kegiatan Audit Kinerja pada tahun 2019, sebagai berikut:

Kegiatan	**Lokasi**	**Bulan**
Audit Lapangan	Prov. Jateng	Januari
Audit PBJ	Kab. Lombok Timur, Prov. Aceh, Sulut, Sumut, Bengkulu	Pebruari
Audit PBJ	Sulut, Sumut, NTB, Aceh, Bengkulu	Maret
Audit PBJ	Kab.Lombok Timur	April
Audit PBJ	Jateng, Jambi, Papua Barat, Jabar, Sumsel, Lampung, NTT, Kab.Batang, Kab. Majalengka, Kab.Garut, Kab.Bandung, Kab.Belu	Juni
Audit Ketaatan	Jambi, Sumsel, Lampung, Papua Barat	Juni
Audit PBJ	Kab.Magelang, Kab.Bondowoso, Kab.Banyuwangi, Kab.Temanggung	Juli
Audit PBJ	Sultra, Kalteng	Agustus
Audit Ketaatan	Kab.Magelang, Kab.Malang, Lembang, Ciawi Kab.Bogor, Cinagara Kab.Bogor, Prov.NTT	September
Audit PBJ	Sumut	Oktober
Audit PBJ	Banten, Sulteng, Kalsel, Kalbar	Nopember
Audit Ketaatan Bantuan Santri Tani Milenial	Sembawa, DIY, Magelang, Gowa	Nopember
Audit BMN	Bogor	Desember
Audit Ketaatan	Jakarta	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

2. Pengawalan SPIP

Tujuan Pengawalan dan Evaluasi pada unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa

Inspektorat I telah menggunakan anggaran untuk pengawalan senilai Rp2.094.872.460,00 atau 98,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.136.528.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 144 rekomendasi dan tercapai sebanyak 153 rekomendasi (106,25%). Kegiatan Pengawalan pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Pemantauan Pengadaan Benih Bawang Putih	Prov.Jateng, Kab. Karanganyar, Kab, Lombok Timur, Kab.Humbang Hasundutan Sumut	Januari
2	Pembinaan SPIP	Kupang	Pebruari
3	Pembinaan SPIP RIPH Bawang Putih	Yogyakarta	Pebruari
4	Pemantauan Kawasan Bawang Putih	Semarang, Kab. Humbang Hasundutan Sumut	Maret
5	Pengawalan Kawasan Bawang Putih	Kab.Garut, Kab.Malang, Kab. Majalengka, Sulsel, Kab. Cianjur, Prov.Jabar	April
6	Pengawalan Kelompok Santri Tani Milenial	Jakarta dan Jabar, Kab. Gowa, Kab. Bogor, Sumsel, Lembang, Kab.Magelang, Kab.Malang, Jambi, Medan	April
7	Pengawalan SPIP Kawasan Bawang Putih	Kab.Solok, Kab. Lumajang, Prov. Sumut	Juli
8	Pengawalan Program #Bekerja	Kab. Pasaman, Kab.Blora, Kab. Lebak, Kab.Majalengka, Kab.Malang, Kab.Grobogan, Kab.Kolaka	Agustus
9	Pengawalan SPIP Kawasan Bawang Putih	Prov.Bali, Kab.Tabanan, Kab.Lombok Timur, Kab.Solok, Kab.Batang, Prov.Sulteng, Kab.Donggala	Agustus
10	engawalan SPIP Kawasan Bawang Putih	Kab.Probolinggo, Kab.Pekalongan, Prov.Aceh, Kab.Majene Sulbar, Prov.Jambi, Prov.Sumsel, Kab.Wonosobo, Prov.NTT,	September
11	Pengawalan SPIP Kawasan Bawang Putih	Kab. Banjarnegara, Kab. Minahasa Selatan, Kab.Sumbawa, Kab.Bima, Prov.Sulut, Kab.Minahasa, Kab. Karanganyar, Kab. Kepahiang, Kab.Bantaeng,	Oktober

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP menurut Perpres No 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Untuk itu setiap pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi atas

implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja di instansinya secara berkelanjutan. Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat I telah menggunakan anggaran untuk pengawalan senilai Rp85.875.000,00 atau 57,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp148.632.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 11 rekomendasi dan tercapai sebanyak 13 rekomendasi (118,18%). Kegiatan Evaluasi SAKIP pada tahun 2019, sebagi berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Evaluasi SAKIP TA 2018 Lingkup Ditjen Hortikultura	Jakarta	Maret
2	Evaluasi SAKIP TA 2018 Lingkup Sekjen	Jakarta	Maret
3	Evaluasi SAKIP TA 2018 Lingkup BPPSDMP	Jakarta	Maret

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

4. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.

Tujuan reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2019 adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa RKAKL pagu alokasi anggaran yang disusun telah sesuai dengan pagu alokasi anggaran K/L yang ditetapkan Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR dalam pembincaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat I telah menggunakan anggaran untuk Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL

senilai Rp643.690.593,00 atau 95,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp673.848.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 49 rekomendasi dan tercapai sebanyak 54 rekomendasi (110,20%). Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Reviu Konsolidasi LK Eselon I	Malang, Depok	Januari
2	Reviu RKAKL Refocusing	Depok	Januari
3	Reviu Revisi Anggaran	Jakarta	Januari
4	Reviu LAKIN	Jakarta, Depok	Pebruari
5	Reviu LK UAPPA/B-E I	Jakarta	Pebruari
6	Reviu LK Kementerian Pertanian BA.099 dan BA.018	Depok, Bogor	Pebruari
7	Reviu RKAKL	Depok, Jakarta	Maret
8	Reviu SBK	Bogor	April
9	Reviu Hasil Inventarisasi Dalam Rangka Revaluasi Ulang Barang Milik Negara	Sumut, NTT, Jateng, Bogor, Lembang, Jatim, Kalsel, Sulsel	Mei
10	Reviu LK BA 999.07, BA 999.08 dan BA.018	Depok dan Jakarta	Juli
11	Reviu LK UAPPA/B - E I dan wilayah	Jakarta, DIY, Bogor, Sumbar, Bengkulu, Gorontalo, Sulsel, Lampung, Sumut, Kaltim, Sulsel	Juli
12	Reviu RKAKL	Bogor	Juli
13	Reviu Hasil Inventarisasi Dalam Rangka Revaluasi Ulang Barang Milik Negara	Jambi, Lampung, Papua Barat,	Juli
14	Reviu Usulan Revisi RKAKL	Bogor	Agustus
15	Reviu RKAKL Pagu Alokasi	Bogor	September
16	Reviu Revisi Dipa RKAKL	Jakarta, Depok	Oktober
17	Reviu Aplikasi BAST BANPEM	Jakarta	Nopember
18	Revisi DIPA	Jakarta	Desember
19	Reviu HPS	Kab.Gowa. Kab.Bogor	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.994.543.235,00 atau 97,77% dari pagu sebesar Rp10.222.550.000,00. Sedangkan target rekomendasi sebanyak 311 rekomendasi dan tercapai sebanyak 324 rekomendasi (104,18%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat I meliputi:

1. Audit Kinerja

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat II telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp3.365.555.234,00 atau 98,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.401.564.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 130 rekomendasi dan tercapai sebanyak 142 rekomendasi (109,23%). Kegiatan Audit Kinerja pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Audit Lapangan	Prov. Jateng	Januari
2	Reviu Tunda Bayar	Sulsel, Sultra, Sumut, Jateng, NTB, Sumut, Kalsel, Kalteng, Jatim, DIY, Jakarta	Pebruari
3	Audit Kinerja	Banten	Pebruari
4	On the Spot Audit Kinerja	Sumut, Sulut	Maret
5	Audit Kinerja	Jakarta	Maret
6	Audit TLHA BPK	Kalsel, Jateng, Sumut	April
7	Audit Kinerja	Kalbar, Jateng, Sulsel	Mei
8	Audit Kinerja	Kalsel, Jakarta	Juni
9	Pemeriksaan Lapangan mendukung Audit Kinerja	Sumsel, Jabar, Kalsel, NTB	Juni
10	Pemeriksaan Lapangan mendukung Reviu Tunda Bayar	Sumbar, Sumut, Jateng, Kalsel	Juli
11	Pemeriksaan Lapangan mendukung Audit Kinerja	Jambi, Babel, Banten, Bogor	Juli
12	Audit Kinerja	Sumut, Jabar, Banten, Lampung, Jabar, Riau, Jateng, NTB, Maluku, Maluku Utara	Agustus
13	Audit Kinerja	Riau, Jateng, NTB, Sulut, Maluku, Maluku Utara, DIY	September
14	Audit TLHA Itjen	Kab.Tanah Bumbu Kalsel	Oktober
15	Audit Pusat Kegiatan #Serasi	Jakarta	Nopember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

2. Pengawalan SPIP

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat II telah menggunakan anggaran untuk pengawalan senilai Rp2.111.720.800,00 atau 98,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.136.528.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 144 rekomendasi dan tercapai sebanyak 145 rekomendasi (100,69%). Kegiatan Pengawalan pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Pengawalan SPIP Program Serasi	Prov. Sumsel, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Kalsel, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab.Barito Kuala, Kab. Ogan Komering Ilir	Maret
2	Pengawalan SPIP Program Serasi	Kab.Sidrap, Kab.Soppeng, Prov. Sulsel, Kab.Wajo,	April
3	Pendampingan SPIP Kegiatan Serasi	Sulsel	Mei
4	Pendampingan Pengembangan Kawasan Penyangga Pangan	Kaltim	Agustus
5	Pengawalan SPIP	Sumut	September
6	Pemantauan Kegiatan #Serasi	Sulsel, Sumsel, Kalsel	Oktober
7	Pemantauan Kegiatan Perluasan/Cetak Sawh	Sultra, Sulteng	Oktober
8	Pemantauan Cetak Sawah	Kalteng, Sulteng, Sulsel	Nopember
9	Pemantauan Pengelolaan dan Pemanfaatan Alsin	Jateng, Jatim, Jabar	Nopember
10	Pemantauan Kegiatan #Serasi	Sulsel	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat II telah menggunakan anggaran untuk Evaluasi SAKIP senilai Rp66.159.400,00 atau 89,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp73.560.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi dan tercapai sebanyak 6 rekomendasi (100%). Kegiatan Evaluasi SAKIP pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Evaluasi SAKIP TA.2018 Lingkup Ditjen TP	Jakarta	Mei
2	Evaluasi SAKIP TA.2018 Lingkup Ditjen PSP	Jakarta	Mei

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

4. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat II telah menggunakan anggaran untuk Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL senilai Rp189.013.301,00 atau 93,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp202.830.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 30 rekomendasi dan tercapai sebanyak 30 rekomendasi (100%). Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Reviu LK Semester II	Jakarta	Pebruari
2	Reviu LAKIN Lingkup Ditjen TP, PSP TA.2018	Jakarta	Pebruari
3	Reviu BAST	Aceh, Sumut, Jambi, Kalbar, Kalsel, Sulut	Maret
4	Reviu RKAKL	Bogor, Jakarta	Maret
5	Reviu SBK	Bogor	April
6	Reviu BAST	Kalbar, Sumut, Banten, Sulbar	April
4	Reviu Hasil Inventarisasi dalam rangka Revaluasi Ulang BMN Lingkup Ditjen TP	Sumbar, Sumut, Lampung, Bengkulu	Mei
5	Reviu Hasil Inventarisasi dalam rangka Revaluasi Ulang BMN Lingkup Ditjen TP	Jakarta, Karawang, Depok, Sulut, Sulteng	Juni
6	Reviu Hasil Inventarisasi Dalam Rangka Revaluasi Ulang BMN Lingkup Ditjen TP	DIY	Juli
7	Reviu RKAKL	Bogor	Juli
8	Reviu LK Semester I (UAKPA/B)	Riau, Jateng, Bali, Kalbar, Sulbar, NTT, Maluku, Papua	Juli
9	Reviu LK Semester I	Bogor	Juli
10	Reviu RKAKL Pagu Alokasi	Bogor	September
11	Reviu HPS	Jakarta, Bogor	September
12	Reviu BAST Banpem Mak 526	Bogor,	Oktober
13	Reviu Laporan Keuangan	Solo	Oktober
14	Reviu RKA-BUN Pengelolaan Subsidi Pupuk	Jakarta	Nopember
15	Reviu atas usulan revisi DIPA	Jakarta	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

Realisasi anggaran Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.388.484.370,00 atau 93,77% dari pagu sebesar Rp10.012.170.000,00. Sedangkan target rekomendasi sebanyak 340 rekomendasi dan tercapai sebanyak 180 rekomendasi (52,94%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat III meliputi:

1. Audit Kinerja

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat III telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp3.077.832.739,00 atau

90,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.392.864.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 141 rekomendasi dan tercapai sebanyak 51 rekomendasi (36,17%). Kegiatan Audit Kinerja pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Audit PBJ	Sumbar, Aceh, Kalsel, NTB	Pebruari
2	Audit Kinerja	Sumut, Sumbar, Serpong	Pebruari
3	Audit PBJ	Sumut	Maret
4	Audit Kinerja/Ketaatan	Sumbar, Jakarta, Cianjur, Kalsel, NTB, Bogor, Aceh	Maret
5	Audit BMN	Papua	April
6	Audit Kinerja/Ketaatan	Sultra	April
7	Audit Kinerja/ Ketaatan	Jakarta, Babel, Jatim, Jabar, Sulsel	Agustus
8	Audit PBJ	Jatim	Agustus
9	On The Spot Audit Kinerja	Jateng, NTB, Sumut, Jatim, DIY, Sultra, Jabar, Bali, Kalbar	September
10	Audit Kinerja Kegiatan OPAL dan PUPM TA 2019	Sumut, Banten, Bali, Jateng, Sumsel, Jabar, DIY	Nopember
11	Audit Kinerja / Ketaatan	Sumut	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

2. Pengawalan SPIP

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat III telah menggunakan anggaran untuk pengawalan senilai Rp2.115.206.702,00 atau 99,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.136.528.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 144 rekomendasi dan tercapai sebanyak 70 rekomendasi (48,61%). Kegiatan Pengawalan pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Pendampingan Tim BKP untuk Pengambilan Dokumen Pemeriksaan BPK-RI	Jatim, Sulsel	Pebruari
2	Pengawalan Program BEKERJA	Puslitbangnak Bogor, Balitnak Bogor, BPTP Jabar, BBP2TP Bogor, BB Biogen Bogor, BB Pasca Panen Bogor, BPATP Bogor.	April
3	Pendampingan Survey Lokasi Pembangunan Nursery	Babel, Kaltim, Kalsel, Kaltara, Sulsel, Sultra, NTT, Malut, Kalteng, Bali	Oktober
4	Pendampingan Pengelolaan Produksi Jagung	Jatim	Nopember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat III telah menggunakan anggaran untuk Evaluasi SAKIP senilai Rp84.743.000,00 atau 84,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.740.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 9 rekomendasi dan tercapai sebanyak 9 rekomendasi (100%). Kegiatan Evaluasi SAKIP pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Evaluasi SAKIP TA.2018 pada BKP	Jakarta	Maret
2	Evaluasi SAKIP TA.2018 pada Badan Litbangtan	Jakarta	Maret
3	Evaluasi SAKIP TA.2018 pada Ditjen Perkebunan	Jakarta	Maret

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

4. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat III telah menggunakan anggaran untuk Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL senilai Rp278.083.800,00 atau 94,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp293.370.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 45 rekomendasi dan tercapai sebanyak 49 rekomendasi (108,89%). Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Reviu LK Eselon I Semester II TA. 2018 pada Badan Litbangtan, BKP, Ditjenbun	Bogor, Serpong dan Jakarta, Surabaya	Januari
2	Reviu RKAKL Refocusing TA. 2019 Lingkup Ditjenbun, Badan Litbangtan dan BKP	Depok	Januari
3	Reviu Draft LAKIN Balitbangtan, Ditjenbun dan BKP TA 2018	Jakarta dan Bogor	Pebruari
4	Reviu Tunda Bayar	Sukamandi	Pebruari
5	Reviu HPS	Jakarta	Pebruari
6	Reviu atas Tindak Lanjut Penilaian Kembali BMN	Jakarta, Bogor	Maret
7	Reviu HPS	Bandung, Bogor	Maret
8	Reviu Tunda Bayar	Jombang	April
9	Reviu HPS	Bogor	April
10	Reviu SBK TA 2020 lingkup Badan Litbang	Bogor	April
11	Reviu Revisi RKAKL TA 2019 lingkup Ditjen Perkebunan dan BKP	Bogor, Depok	April
12	Reviu Pendataan dan Inventarisasi BMN dalam Rangka Revaluasi Ulang BMN	Jatim, Bali, Jateng, Sulsel, Sumut, Sulut, Sumbar, Kaltim, Jabar, Banten, DIY, Sumsel, Kalsel	Mei
13	Reviu Revisi RKAKL TA.2019 Lingkup Ditjenbun	Jakarta	Mei
14	Reviu Pertanggungjawaban BANPER Lingkup BKP	Depok	Juni
15	Reviu Pendataan dan Inventarisasi BMN dalam Rangka Revaluasi Ulang BMN Lingkup Ditjen Perkebunan	Bogor	Juni
16	Reviu Pendataan dan Inventarisasi BMN dalam Rangka Revaluasi Ulang BMN Lingkup Badan Litbang	Bogor	Juli
17	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2020 Lingkup Ditjenbun, Badan Litbangtan dan BKP	Bogor	Juli
18	Reviu LK Semester I Tahun 2019 pada Satker Kementan	NTB, Kepri, Sulteng, Kalteng, Malut, Sultra, Kep.Babel, Jabar	Juli
19	Reviu Revisi RKAKL pada Badan Litbang, Ditjen Perkebunan dan BKP	Bogor	Agustus
20	Reviu RKAKL Lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbangtan, BKP	Bogor	September
21	Reviu BAST 526	Bogor dan Depok	Oktober

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.714.768.663,00 atau 97,64% dari target sebesar Rp9.949.380.000,00. Sedangkan target rekomendasi sebanyak 352 rekomendasi dan tercapai sebanyak 352 rekomendasi (100%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat IV meliputi:

1. Audit Kinerja

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat IV telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp3.402.541.142,00 atau

98,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.450.776.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 153 rekomendasi dan tercapai sebanyak 153 rekomendasi (100%). Kegiatan Audit Kinerja pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Audit Pelayanan	Banten	Pebruari
2	Audit Ketaatan	Kab.Bukittinggi, Kab.Bogor, Cipelang Kab.Sukabumi, Prov.Sumut, Kab.Subang, Prov. Sumbar, Prov,NTB, Prov. Sulut, Kab.Sumbawa Besar, Kab. Cilegon, Jakarta	Maret
3	Audit Kinerja	Jateng	April
4	Audit Ketaatan	Jatim, Riau, Jabar, Kepri, Kaltara, Lampung, Kaltim	April
5	Audit Ketaatan	Jateng, Jabar, Kalsel, NTT, Aceh, Kalbar	Juli
6	Audit Ketaatan	Jakarta	Agustus
7	On The Spot Lingkup Barantan	Medan, DIY, Sumsel, NTB, Cilacap, Bekasi	Agustus
8	On The Spot Lingkup Ditjen Nak dan Keswan	DIY, Banten, Jateng, Bogor, Prov. Jabar, NTB	Agustus
9	On The Spot Lingkup Itjentan	NTB, Jabar, Sumsel	Agustus
10	Audit Ketaatan TA. 2018 pad Itjentan	Jakarta	September
11	Audit Ketaatan TA. 2018	Kalsel, Jabar, Bali	Oktober
12	Audit Kegiatan BEKERJA TA 2019	Jatim, Jateng, Sulsel, DIY, Jabar	Nopember
13	Audit Kegiatan SIWAB TA. 2019	Jatim, Jateng, Sumsel, DIY	Nopember
14	Audit Terhadap Implementasi SPIP Kegiatan TA. 2019	Sumbar, Lampung, Kalsel, Riau	Nopember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

2. Pengawalan SPIP

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat IV telah menggunakan anggaran untuk pengawalan senilai Rp2.121.451.069,00 atau 99,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.136.528.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 144 rekomendasi dan tercapai sebanyak 144 rekomendasi (100%). Kegiatan Pengawalan pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Pengawalan SPIP	Bogor, Lampung	Januari
2	Pengawalan Kegiatan BEKERJA	Sulsel, Sultra, Sulteng, Kalsel, Sumbar, Bali	Pebruari
3	Pengawalan Kegiatan BEKERJA	Lembang, Bali, Kalsel, Sumut, DIY, Jateng	April
4	Pengawalan Kegiatan #BEKERJA	Subang	Mei
5	Pengawalan SPIP	Kab.Belawan, Kab, Deli Serdang, Banten, Bali, Jateng, Sulsel, Kepri, Surabaya	Juni
6	Pengawalan SPI kegiatan SIWAB Tahun 2019	Jabar, Aceh, Sulut, Sumut, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalteng	September
7	Pengawalan SPI kegiatan Perkarantinaan Tahun 2019	Jabar, NTB	September
8	Pengawalan SPI kegiatan Perkarantinaan Tahun 2019	NTT	Oktober
9	Pendampingan Penyusunan LAKIN TA. 2019 Lingkup Itjentan, Barantan dan Ditjen Nak dan Keswan	Jakarta	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

3. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat IV telah menggunakan anggaran untuk Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL senilai Rp244.248.200,00 atau 89,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp271.620.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 45 rekomendasi dan tercapai sebanyak 45 rekomendasi (100%). Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Reviu LAKIN lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan, Barantan dan Itjentan	Jakarta	Januari
2	Reviu LK Semester II TA. 2018 lingkup Ditjen Nak dan Keswan, Barantan dan Itjentan	Jatim, Bogor dan Jakarta	Januari
3	Reviu RKAKL Refocusing nggaran Kementan TA.2019	Depok	Januari
4	Reviu LK atas Tanggapan Konsep LHP BPK-RI	Depok	April
5	Reviu Usulan SBK Lingkup Barantan, Itjentan	Bogor	April
6	Reviu Hasil Inventarisasi dalam Rangka Revaluasi Ulang BMN	Lampug, Kalsel, Sulsel, DIY, Banten, Jakarta, Sumsel	Mei
7	Reviu LK Semester I TA. 2019 lingkup Ditjen Nak dan Keswan, Barantan dan Itjentan	Jakarta	Juli
8	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2020 Lingkup Ditjennak dan Keswan, Barantan dan Itjentan	Bogor	Juli
9	Reviu LK Semester I Tahun 2019 (UAKPA/B) Lingkup Wilayah	Jambi, Jatim, Aceh, Banten, Sumsel, Papua Barat, Kalsel, Sulut	Juli
10	Reviu RKAKL Realokasi Anggaran Kebutuhan Kekurangan Belanja Pegawai	Bogor	Agustus
11	Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Lingkup Ditjen Nak dan Keswan, Barantan dan Itjentan	Bogor	September
12	Reviu BAST 526	Jatim, Jabar, Sumsel	Oktober

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan data pada Lampiran 1, terlihat bahwa Inspektorat IV telah menggunakan anggaran untuk Evaluasi SAKIP senilai Rp78.977.500,00 atau 96,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp81.540.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 9 rekomendasi dan tercapai sebanyak 9 rekomendasi (100%). Kegiatan Evaluasi SAKIP pada tahun 2019, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan
1	Evaluasi SAKIP Tahun 2018 pada Itjentan	Jakarta	Mei
2	Evaluasi SAKIP Tahun 2018 pada Ditjen Peternakan dan Keswan	Jakarta	Mei
3	Evaluasi SAKIP Tahun 2018 pada Barantan	Jakarta	Mei

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

EVALUASI SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong adanya peningkatan kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor: R.201/PW.160/G.5/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 memperoleh nilai 85,67 kategori “A” atau berpredikat Memuaskan.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019, ditetapkan bahwa target Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian 85,00 sehingga capaian Inspektorat Jenderal tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan.

Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Investigasi sampai dengan bulan Desember 2019 telah melaksanakan kegiatan Audit Tujuan Tertentu, Audit Investigasi, Pembinaan/Penilaian (*asessment*) Maturitas SPIP, Pembinaan/Penilaian mandiri *(self asessment*) pembangunan ZI WBK/WBBM,

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.559.897.632,00 atau 93,89% dari pagu sebesar Rp10.182.360.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 141 rekomendasi dan tercapai sebanyak 123 rekomendasi (87,23%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Investigasi meliputi:

1. Audit Tujuan Tertentu

Audit Tujuan Tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Jenis audit tersebut termasuk diantaranya adalah audit ketaatan, audit *fraud* (kecurangan) dan audit investigatif.

Berdasarkan Lampiran 1, dapat dikemukakan bahwa, capaian kinerja keuangan untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu sebesar Rp4.248.977.074,00 atau 95,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.464.034.000,00. Pada tahun 2019, pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, meliputi:

No.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANAAN
1	ATT Pelayanan Karantina	Jatim dan Sumut	Januari
2	ATT Lanjutan Pengadaan Benih Jagung Hibrida varietas Balitbangtan TA.2017 &2018 (Pemutakhiran)	Jabar, Sumut, Sulteng, Banten,NTB, NTT	Pebruari-Maret
3	ATT Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2018	Sumut, Jambi, Kalsel	Pebruari-Maret
4	ATT atas Pengaduan Masyarakat	Malang, DKI Jakarta, Sumsel	Februari-Maret

No.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANAAN
5	ATT atas PNBP	Sulut, Sulsel, Sukabumi,Sukamandi, Lembang, Malang	April-Mei
6	ATT atas Pengaduan Masyarakat	Bali	Mei
7	ATT atas Pengaduan Masyarakat	Sumbar, Aceh, Kalsel, Sulsel	Juni
8	ATT atas PNBP	Sulsel, Riau	Juni-juli
9	ATT atas PNBP	Banten, Bogor	Juli
10	Klarifikasi ATT dalam rangka Pengaduan Masyarakat	Sulsel, Jatim, Sumut, Lembang	Juli
11	ATT atas Dugaan penyimpangan terhadap pengadaan pd kegiatan Bekerja Tahun 2019 & pengelolaan gratifikasi tahun 2018 & 2019	DIY, Bali, Jatim, Jateng	Agustus
12	ATT atas Dugaan pelanggaran disiplin ASN	Direktorat Perlindungan, Perbenihan, PPHH, Buah & Florikultura, Sayuran & Tan Obat, Sekretariat pd Ditjen Hortikultura Jakarta	Agustus
13	ATT Lanjutan atas PNBP	Banten, Bogor	September
14	ATT atas PNBP TA.2018-2019	Sumbar, Sumut	Oktober
15	Konfirmasi terkait ATT atas Pengaduan Masyarakat	Banten, Sulsel	Oktober-Nopember
16	ATT atas PNBP TA.2018-2019	Sulsel, Jatim,Aceh, Kaltim, Sulut	Nopember
17	ATT atas PNBP TA.2018-2019	Maluku, Babel, Kalteng, Kalbar	Nopember-Desember
18	ATT atas PNBP TA.2018-2019	Sumut, Jambi, Jateng	Desember

No.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANAAN
19	ATT atas pengadaan benih bawang putih	Kab. Karo &Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan & Tapanuli Utara, Kab. Samosir & Toba Samosir, Kab. Tapanuli Selatan & Mandailing Natal, Kab.Dairi & Pakpak Barat	Desember

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

2. Audit Investigasi

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang menyangkut aparatur daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.

Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 2019, capaian kinerja audit investigatif tahun 2019 sebesar Rp234.601.049,00 atau 87,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp269.154.000,00. Kegiatan Audit Investigasi pada tahun 2019, sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	PELAKSANAAN
1	Audit Investigasi atas Pengadaan Benih Bawang Putih TA. 2017 pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang	Jabar	Juli

2	Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Ayam pada Program Bekerja TA. 2018 dan TA.2019	Sulsel, Jatim, Sumut, Lembang, Jateng	Juli
3	Audit Lapangan atas kegiatan Pengembangan Bawang Putih TA. 2017-2019	Jatim, Jateng	Agustus

Sumber Data: Aplikasi Simwas Tahun 2019

3. Kegiatan Pembinaan/Penilaian (*Assesment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian

Pada tahun 2019 tersedia anggaran untuk kegiatan Pembinaan/Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkup Kementerian Pertanian sebesar Rp1.542.524.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.414.610.548,00 atau 91,71% dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertemuan Forum SPI dan Penilaian Maturitas SPI pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan sebagai berikut:

a. Inspektorat Investigasi telah melaksanakan Forum SPI di Tangerang Selatan (Banten) pada tanggal 28 – 30 Oktober 2019 bertempat di Hotel Golden Tulip dengan peserta sebanyak 263 orang atau 116,4% dari target 226 orang. Peserta berasal dari Satker Pusat, UPT lingkup Kementan serta Satker Provinsi/Kabupaten yang membidangi pertanian Wilayah Indonesia Timur dan Jabodetabek, Dinas Pertanian se-provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 16 peserta dan Dinas Pertanian se-provinsi Banten sebanyak 23 peserta.
b. Kegiatan penilaian maturitas SPIP unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dengan capaian kinerja fisik sebanyak 41 unit kerja (136,67%) dari target 30 unit kerja. Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP dengan menggunakan format sesuai Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 41 unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Rekapitulasi hasil penilaian berdasarkan eselon dan kategori disampaikan sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kategori					
		Optimum (5)	Terkelola dan Terukur (4)	Terdefinisi (3)	Berkembang (2)	Rintisan (1)	Belum ada (0)
1	Eselon 1		3	8			
2	Eselon 2			7	2		
3	Eselon 3			11	8	1	
4	Eselon 4			1			
Jumlah			3	27	10	1	

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa 3 unit kerja berpredikat Terkelola dan Terukur atau 7,31%, sebanyak 27 unit kerja berpredikat Terdefinisi atau 65,85%, 10 unit kerja berpredikat Berkembang atau 24,39% dan 1 unit kerja berpredikat Rintisan atau 2,44%.

Pada tahun 2019, BPKP juga melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Pertanian dengan perolehan nilai 3,112 atau dalam kategori Terdifinisi.

4. Pembinaan/Penilaian Mandiri (*Self Asessment*) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM)

Kegiatan Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui: a) Pemasyarakatan Anti Korupsi, b) Pembinaan Anti Korupsi dan c) Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat diinformasikan sebagai berikut:

a. Pemasyarakatan Anti Korupsi

Kegiatan pembinaan pembangunan integritas program dan layanan pertanian melalui "Protani" diselenggarakan di PO Hotel Semarang Jawa Tengah, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2019. Sebelum pembukaan ditampilkan tarian selamat datang khas dari Provinsi Jawa Tengah. Sambutan awal disampaikan oleh Inspektur Jenderal yang diwakili oleh Inspektur Investigasi. Dalam sambutannya Inspektur Jenderal yang dibacakan oleh Inspektur Investigasi menjelaskan, bahwa Tema yang diambil yaitu, **"Wujudkan lumbung pangan melalui perencanaan**

program dan layanan pertanian yang berintegritas" terkandung makna bahwa perencanaan yang baik dan harmonis dari pusat sampai dengan dan layanan pertanian yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terkendali, mengingat perencanaan yang balk akan berkontribusi 60% terhadap tercapainya tujuan program/kegiatan dan layanan pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2019, menggunakan sumber daya manusia sebanyak 235 orang atau 94% dari target 250 orang, terdiri dari PPK dan Pejabat yang membidangi perencanaan pada Satker Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah di 8 Provinsi (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY).

b. Pembinaan Tekad anti Korupsi melalui PROTANI

Pelaksanaan pembinaan Tekad Anti Korupsi Melalui "Protani" Untuk Mewujudkan Program Dan Layanan Pertanian Yang Bersih Dan Bebas Pungli tahap II yang telah dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2019, bertempat di Hotel Hineni Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dengan jumlah Peserta sebanyak 260 orang yang terdiri petugas dinas dan penyuluh kabupaten/kota, UPT lingkup Kementerian Pertanian dan TNI di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Protani mengusung Tema, **"Peran Strategis Penyuluh Pertanian dalam Mewujudkan Program Swasembada Pangan Berkelanjutan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045".**

c. Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM

Penilaian unit kerja WBK Tahun 2019 didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Inspektorat Jenderal pada Tahun 2019 telah melakukan penilaian Pembangunan ZI-WBK-WBBM terhadap 55 unit kerja atau 148,65% dari target 37 unit kerja.

Hasil penilaian terhadap 55 unit kerja, menunjukkan sebanyak 42 unit kerja atau 76,36% dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat WBK, dan sebanyak 13 unit kerja atau 28,88 % dinyatakan tidak lulus WBK, karena belum memenuhi kriteria ZI-WBK-WBBM. Terhadap unit kerja yang dinyatakan tidak lulus karena belum memenuhi kriteria ZI-WBK-WBBM dan masih terdapat indikator yang belum dipenuhi, terutama pada indikator proses yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas. Selain itu, pada beberapa kegiatan belum dibuat laporan monev dan tindak lanjutnya secara tertulis.

Terhadap unit kerja yang dinyatakan lulus, Kementerian Pertanian mengusulkan 40 unit kerja kepada Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM tingkat Nasional ke melalui surat usulan Nomor B. 2206/PW.410/A/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan rincian unit kerja yang sebagai berikut.

1) Unit Kerja Predikat WBBM:

- Balai Besar Veteriner Denpasar
- Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor
- Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
- Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
- Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
- Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

2) Unit Kerja Predikat WBK:

- Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor
- Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis
- Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
- Pusat Veteriner Farma urabaya
- Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta
- Balai Veteriner Lampung
- Balai Embrio Ternak Cipelang
- Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

- Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
- Balai Inseminasi Buatan Lembang
- Balai Veteriner Subang
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Bogor
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Veteriner Bogor
- Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
- Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor
- Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya
- Balai Besar Karantina Pertanian Belawan
- Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
- Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam
- Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Bekasi
- Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo
- Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan
- Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang
- Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi
- Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

Berdasarkan usulan tersebut Inspektorat Investigasi telah melakukan pendampingan, baik pada saat persiapan maupun pada saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PAN dan RB.

Hasil dari penilaian tingkat nasional oleh Kementerian PAN dan RB ditetapkan unit kerja berpredikat WBK,yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden,Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang,Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balitas) Malang.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kebijakan dalam pengelolaan *Whistleblower System* di Kementerian Pertanian telah ditetapkan, yaitu dengan surat keputusan Menteri Nomor Permentan Nomor.88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pedomen Pengelolaan WBS dan Penetapan Admin Pengelola WBS dengan Surat Keputusan Nomor 788/Kpts/OT.210/H/06/2014 direvisi menjadi SK Nomor B-1086.I/Kpts/OT.210/05/2017. Selain itu, pada Tahun 2018 dengan adanya MoU pengelolaan WBS dengan KPK, maka setiap semester dilakukan pemantauan oleh KPK terkait pengaduan yang masuk dan tindaklanjutnya, dan KPK juga akan melimpahkan pengaduan yang masuk melalaui WBS KPK.

Pada Tahun 2019, jumlah pengaduan sebanyak 18 buah yang melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 1 buah dan *Whistleblower System* Kementerian Pertanian sebanyak 2 buah serta surat pengaduan sebanyak 15 buah.

Terhadap pengaduan tersebut, Inspektorat Investigasi telah menindaklanjuti diantaranya melalui ATT, konfirmasi dengan Eselon I dan telaah pengaduan masyarakat sebanyak 17 buah atau 94,44% dengan rincian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 1 buah dan *Whistleblower System* Kementerian Pertanian sebanyak 2 buah serta surat pengaduan sebanyak 14 buah. Namun demikian, sejak bulan Oktober 2019 aplikasi WBS mengalami kendala teknis, sehingga aplikasi WBS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 tidak dapat diakses.

6. Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran anti korupsi dan menekan tindakan KKN di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Permentan No. 97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

Pengelolaan UPG dilakukan oleh Inspektorat Investigasi selaku Sekretariat UPG Kementan.Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada KKP-RI. Laporan UPG Tahun 2019 sebanyak 670 laporan senilai Rp1.182.975.524.000,00 terdiri dari Pelaporan Gratifikasi Kedinasan sebanyak 594 laporan (88,66%) senilai Rp1.182.884.602,00, sedangkan Gratifikasi Umum sebanyak 76 laporan (11,34%) senilai Rp90.922.000,00. Sejak bulan Juni 2018, pelaporan gratifikasi telah dilakukan secara on line dengan aplikasi SIGAP-UPG dengan alamat: sigap-upg.pertanian.go.id, alamat aplikasi online tersebut telah dapat diakses di seluruh website unit kerja Kementerian Pertanian.

Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berikut Ikhtisar Eksekutif laporan hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2019:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019. Telaah sejawat ekstern antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas hasil pengawasan dari aspek penilaian ekstern, di bawah koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik terhadap Standar AAIPI. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan

efektivitas penerapan Kode Etik Auditor Intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik dalam membantu pencapaian program dan tujuan BPS.

2. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Badan Pusat Statistik terhadap standar adalah 69,19%, dengan kategori penilaian **"CUKUP"**. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:
   a. Standar Atribut : 71%
   b. Standar Pelaksanaan : 68%

   Nilai 69,19% menunjukkan kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan "Cukup" menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi perhatian *(concern)* manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

3. Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik perlu melakukan sejumlah peningkatan dan/atau perbaikan dalam rangka mendorong kesesuaian praktik pengawasan intern dengan Standar AIPI, antara lain:
   a. Melakukan revisi terhadap Piagam Audit dengan menambahkan prinsip dasar pengawasan intern, definisi pengawasan intern, standar, kode etik dan sifat jasa asuransi dan konsultansi.

b. Menyusun perencanaan Diklat *Fraud* Audit bagi auditor dalam rangka peningkatan kompetensi atau dilakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
c. Melakukan penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern.
d. Menyelaraskan standar audit di BPS dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan menyampaikan PKPT Inspektorat Utama ke auditor eksternal/lainnya.
e. Meningkatkan kemampuan auditor di bidang audit Teknologi Informatika (TI), TABK, audit tata kelola organisasi dan tata kelola TI serta merencanakan audit tersebut dalam PKPT serta melaksanakannya sesuai PKPT.
f. Membangun Sistem Pengendalian Intern pada di tataran kegiatan.
g. Perencanaan audit mengacu pada standar audit dari AAIPI, antara lain:
    1) Seluruh PKA memuat tujuan audit secara spesifik dan prosedur untuk dokumentasi, serta memuat seluruh langkah kerja yang menjadi temuan audit pada LHA.
    2) Seluruh penugasan didukung dengan hasil survei pendahuluan yang memuat risiko kegiatan.
    3) Seluruh penugasan audit melibatkan peran Pengendali Teknis untuk menjamin mutu pengawasan.
h. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dari AAIPI, antara lain:
    1) KKA memuat jawaban atas pelaksanaan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam PKA dan KKA didukung dengan bukti audit yang rekomacu serta memuat kesimpulan.
    2) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan dan masa retensi atas informasi audit termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain.
    3) Pengendali teknis mereviu KKA.
    4) Seluruh temuan memuat kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi.
    5) Seluruh LHA mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan.

6) Penyelesaian LHA sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu selama 4 minggu.
7) Kriteria audit merujuk ketentuan pada pasal dan ayat terkait substansi permasalahan.
8) Menyelaraskan antara PKA, KKA dan BAHP.
9) Pemantauan tindak lanjut didukung dengan surat tugas pemantauan dan pada LHA memuat tindak lanjut tahun sebelumnya.

4. Memperbaiki dan meningkatkan penerapan Kode Etik Auditor Intern di lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik, antara lain:
   a. Mengevaluasi Kode Etik Profesi Lingkup Inspektorat Utama BPS;
   b. Melakukan sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Auditor Lingkup Inspektorat Utama BPS kepada seluruh auditor; dan
   c. Menyusun mekanisme penanganan pelanggaran kode etik.
5. Memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik perlu melakukan hal-hal berikut, antara lain:
   a. Memenuhi jumlah auditor madya dan pertama sesuai kebutuhan;
   b. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan PKPT yang telah disusun;
   c. Menyediakan alat kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
   d. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi APIP.
6. Meningkatkan pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik perlu melakukan hal-hal berikut, antara lain:
   1) Waktu dan anggaran reviu diupayakan ada penambahan sehingga dapat mengindentifikasi dan memberikan masukan untuk perbaikan terhadap permasalahan.
   2) Melakukan *probity* audit untuk menyakinkan bahwa pengumpulan data telah dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga dapat menjamin

kepercayaan publik terhadap keandalan data yang dirilis oleh BPS (akurasi, ketepatan penyajian, interpretabilitas).

3) Menekankan fungsi APIP sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini dan penjamin mutu.
4) Meningkatkan kapabilitas auditornya terutama dalam pemahaman peraturan-peraturan terbaru, teknik audit, teknik berkomunikasi, dan hal-hal lain yang menunjang kegiatan pengawasan.
5) Membuka layanan konsultasi secara resmi agar satuan kerja yang membutukan dapat langsung berkonsultasi dengan APIP tanpa harus menunggu jadwal pengawasan di satuan kerjanya

7. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik, antara lain.
   a. Penerapan aplikasi E SPIP dan E SPI Online.
   b. Pelaksanaan c*urrent* audit Pengadaan Barang/jasa *online.*
   c. Auditor telah mendapatkan pelatihan/workshop berkelanjutan setiap tahun.

Sekretariat Itjentan

Sekretariat Itjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 desember 2019 sebesar Rp41.427.163.854,00 atau 95,37% dari target sebesar Rp43.439.351.000,00. Sedangkan target kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebanyak 3 layanan dan tercapai sebanyak 3 layanan (100%). Berikut disampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian:

1. **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

   Kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Perencanaan dan Evaluasi selama setahun, meliputi:

   a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.981.700.000,00 dan tercapai sebesar Rp2.722.752.567,00 (91,32%), meliputi 1) Penyusunan PKAT (80,09%), 2) Inventarisasi Data Satker dalam rangka Validasi PBJ dan Survei IACM (99,48%), 3) Penyusunan SBK Itjen (88,44%), 4) Penyusunan RKA-KL (82,80%), 5) Penyusunan RKT Itjen (89,67%), 6) Temu Koordinasi Perencanaan (80,67%), 7) Penyusunan PPA, POK dan ROK Itjen (84,73%), 8) Pelaksanaan kegiatan SPIP lingkup Sekretariat, kegiatan B12 Stranas KPK (58,57%).

   b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.301.440.000,00 dan tercapai sebesar Rp2.961.636.401,00 (89,71%), meliputi 1) Penyusunan Laporan Semester (94,99%), 2) Penyusunan Laporan Tahunan Itjen (45,20%), 3) Penyusunan Laporan AKIP Itjen (LAKIN) (45,49%), 4) Penyusunan Laporan Tahunan APIP (71,82%), 5) Pengawasan, Pengawalan, Monitoring dan koordinasi UPSUS Pajale (93,18%), 6) Penyusunan Laporan IACM Itjen (72,70%), 7) Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 (84,81%), 8) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penganggaran (PMK 214) (84,80%), 9) Penyusunan Laporan e-monev Bappenas (11,32%).

Kegiatan Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan *good governnent* dan *clean governance* serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation mengembangkan model pengukuran kapabiltas pengawasan intern dengan IACM (Internal Audit Capability Model). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (Self Assesment) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi Self Assesment yang telah dilakukan Itjentan. Berdasarkan Laporan Hasil Validasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor: LAP-199/D102/1/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memcapai Kapabilitas APIP Level 3.

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Keuangan dan Perlengkapan selama setahun, yaitu:

a. Pengelolaan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.017.547.000,00 dan tercapai sebesar Rp922.258.000,00 (90,64%), meliputi: 1) Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan (97,83%), 2) Penyusunan Daftar Gaji Induk (88,28%), 3) Pemberkasan dan Penataan Arsip/dokumen (88,74%),

4) Penyusunan Tukin dan uang Makan (83,57%), 5) Penyusunan Dosir dan Pajak (44,44%), 6) Verifikasi dan Klasifikasi Arsip LHA (0%), 7) Monitoring, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (87,63%), 8) Penilaian dan Penyusutan Arsip (96,11%), 9) Penyusunan Laporan Keuangan (65,84%), 10) Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited (67,03%), 11) Penyusunan Laporan Keuangan Audited (93,21%), 12) Persiapan Pemeriksaan BPK (34,96%).

b. Pelayanan Umum dan Perlengkapan, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.738.198.000,00 dan tercapai sebesar Rp2.457.258.000,00 (90,64%), meliputi: 1) Honor pengelolaan SAK (99,98%), 2) Penyusunan SIMAK BMN (99,67%), 3) Inventarisasi BMN Itjen (95,24%), 4) Penghapusan BMN Itjen (91,00%), 5) Dokumen KIB dan DBR BMN/Penilaian BMN (95,24%), 6) Pelaksanaan Raker lingkup Itjen (84,17%), 7) Temu Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan (88,33%), 8) Pelaksanaan PSP BMN (79,83%), 9) Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa (60,46%), 10) Evaluasi Pelayanan Perkantoran (70,49), 11) Honor panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa (64,15%).

c. Layanan Internal, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan tercapai sebesar Rp2.827.258.000,00 (94,24%), meliputi: 1) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (99,99%), 2) Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (87,39%), 3) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (95,48%).

d. Layanan Perkantoran, dengan pagu anggaran sebesar Rp26.691.910.000,00 dan tercapai sebesar Rp26.145.166.505,00 (97,95%), meliputi: 1) Gaji dan Tunjangan (98,45%), 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor (94,84%).

3. Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (OKHH)

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas selama setahun, yaitu:

a. Pengelolaan Kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.051.370.000,00 dan tercapai sebesar Rp935.247.000,00 (88,96%), meliputi: 1) Pelaksanaan Seminar Bidang Pengawasan (41,81%),

2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pegawai (97,20%), 3) Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian (96,63%), 4) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur dan Pelayanan Publik (73,27%), 5) Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (96,72%), 6) Penyusunan Rencana Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Penjenjangan (96,23%), 7) Pembinaan Mental dan Jasmani PNS (85,03%), 8) Pelaksanaan Diklat Penilaian Angka Kredit (95,70%), 9) Penyelenggaraan Diklat Reviu RKAKL (94,17%), 10) Pelaksanaan Kegiatan Deklarasi Agen Perubahan (74,37%).

b. Pelayanan Humas dan Protokol, dengan pagu anggaran sebesar Rp978.088.000,00 dan tercapai sebesar Rp837.262.432,00 (85,60%), meliputi: 1) Penilaian Karya Tulis Ilmiah (98,05%), 2) Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor (97,58%), 3) Pelaksanaan Evaluasi LAPOR! (89,14%), 4) Penyusunan Desain dan Artikel Website (98,33%), 5) Penyelenggaraan Temu Koordinasi Kehumasan Eselon I (91,13%), 6) Temu Koordinasi OKHH (71,51%), 7) Penyelenggaraan PPID (92,47%), 8) Penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan (97,12%), 9) Keikutsertaan pada Pameran Hari Pangan Sedunia (98,97%), 10) Pelaksanaan kegiatan Bincang Asik Pertanian /BAKPIA (94,06%).

c. Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan RB, dengan pagu anggaran sebesar Rp117.410.000,00 dan tercapai sebesar Rp93.375.000,00 (85,60%), meliputi: 1) Satlak PI lingkup Sekretariat (46,48%), 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (97,92%).

4. Bagian Data Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP)

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Data Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP) selama setahun, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.561.688.000,00 dan tercapai sebesar Rp1.524.996.500,00 (97,65%), meliputi a. Pelaksanaan Analisi LHP (99,72%), b. Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengawasan (99,32%), c. Pemutakhiran Data LHP BPK/BPKP (97,84%), d. Pemutakhiran Data LHP Itjen (97,91%), e. Penyusunan Peta Rawan Penyimpangan dan KN (89,28%), f.

Temu Koordinasi Tindak lanjut Hasil Pengawasan (86,71%), g. Pelaksanaan Survei Pemanfaatan Rekomendasi (99,92%).

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP dan BPK-RI. Tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah untuk mendorong *auditee* (obyek pemeriksaan) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, baik yang berupa rekomendasi yang bersifat administratif, subtansi teknis, ketatalaksanaan maupun rekomendasi kerugian negara untuk disetorkan ke Kas Negara.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

   Akumulasi temuan awal hasil pemeriksaan yang sedang dalam proses penyelesaian tindaklanjut sampai bulan Desember 2019 sebesar Rp365.033.449.805,72, sehingga sisa temuan kerugian negara yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp45.015.989.345,68 (12,33%).

   Berdasarkan tabel dibawah diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu Rp115.807.649.620,53 atau 31,73% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada Inspektorat Jenderal Pertanian yaitu sebesar Rp111.609.179 atau 0,03% dari seluruh temuan kerugian negara. Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP, sebagai berikut:

NO.	ESELON I	TEMUAN AWAL		TINDAK LANJUT		SISA		
		KEJ	(RP)	KEJ	(RP)	KEJ	(RP)	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	8	111.609.179,00	8	111.609.179,00	-	-	-
2	DITJEN PERKEBUNAN	1086	72.234.091.050,11	839	62.191.482.922,70	247	10.042.608.127,41	13,90
3	DITJEN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1841	53.323.713.966,35	1.779	51.994.348.833,96	62	1.329.365.132,39	2,49
4	BADAN LITBANG PERTANIAN	2015	31.753.034.565,84	1.973	30.104.543.466,63	42	1.648.491.099,21	5,19
5	BADAN KETAHANAN PANGAN	140	1.777.938.740,41	136	1.768.938.740,41	4	9.000.000,00	0,51
6	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1249	12.730.644.477,03	1.249	12.730.644.477,03	-	-	-
7	SEKERTARIAT JENDERAL	544	10.561.642.188,28	531	9.054.044.643,78	13	1.507.597.544,50	14,27
8	DITJEN TANAMAN PANGAN	1.381	115.807.649.620,53	1.299	97.800.582.458,81	82	18.007.067.161,72	15,55
9	DITJEN HORTIKULTURA	2.045	26.662.629.530,27	1.862	15.968.870.477,14	183	10.693.759.053,13	40,11
10	DITJEN PSP	642	22.845.382.437,54	632	21.489.745.806,22	10	1.355.636.631,32	5,93
11	BPPSDMP	1.398	17.225.114.050,36	1.394	16.802.649.454,36	4	422.464.596,00	2,45
	JUMLAH	**12.349**	**365.033.449.805,72**	**11.702**	**320.017.460.460,04**	**647**	**45.015.989.345,68**	**12,33**

Sumber Data: Bagian DPLHP

2. Hasil Pemeriksaan BPKP

Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2019, dapat disampaikan bahwa dari temuan awal sebesar Rp21.499.216.385,60 telah diselesaikan sebesar Rp7.838.478.690,04 (36,46%), sehingga sisa akhir sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp13.660.737.695,55 (63,54%). Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKPsebagai berikut:

NO	ESELON I	TEMUAN AWAL		TINDAK LANJUT		SISA		
		KEJ	(RP)	KEJ	(RP)		(RP)	%
1	DITJEN PERTERNAKAN DAN KESWAN	32	756.534.738,44	32	756.534.738,44	-	-	-
2	DITJEN PERKEBUNAN	43	835.298.075,68	40	775.371.303,93	3	59.926.771,75	7,17
3	BADAN LITBANG PERTANIAN	226	2.965.810.502,70	226	2.965.810.502,70	-	-	-
4	BADAN KETAHANAN PANGAN	177	3.498.378.259,35	161	3.313.358.874,35	16	185.019.385,00	5,29
5	BADAN KARANTINA PERTANIAN	2	9.408.342,00	2	9.408.342,00	-	-	-
6	SEKERTARIAT JENDERAL	13	1.051.775,777	12	912.387,777	1	139.388,00	13,25
7	DITJEN TANAMAN PANGAN	286	4.198.681.476	267	2.558.291,587	19	4.196.123.184,41	99,94
8	DITJEN HORTIKULTURA	50	688.370,228	44	588.663,441	6	99.706,79	14,48
9	DITJEN PSP	660	9.226.077.665	657	8.527.967,393	3	9.217.549.697,61	99,91
10	BPPSDMP	575	7.287.180,421	564	5.407.618,425	11	1.879.562,00	25,79
	JUMLAH	**2064**	**21.499.216.385,60**	**2.005**	**7.838.478.690,04**	**59**	**13.660.737.695,55**	63,54

Sumber Data: Bagian DPLHP

3. Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, dapat disampaikan, bahwa dari temuan awal sebesar Rp146.110.391.321,32 telah diselesaikan sebesar Rp123.547.817.778,98 (75,2%), sehingga sisa akhir sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp22.562.573.542,34 (15,44%). Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP, sebagai berikut:

NO.	ESELON I	TEMUAN AWAL		TINDAK LANJUT		SISA		
		KEJ	(RP)	KEJ	(RP)	KEJ	(RP)	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	1	60.369.705,00	1	60.369.705,00	-	-	-
2	DITJEN PERTERNAKAN DAN KESWAN	14	1.733.443.221,85	11	719.389.579,37	3	1.014.053.642,48	58,50
3	DITJEN PERKEBUNAN	21	7.989.232.929,07	18	6.741.430.969,07	3	1.247.801.960,00	15,62
4	BADAN LITBANG PERTANIAN	41	5.661.432.238,84	36	4.635.440.328,39	5	1.025.991.910,45	18,12
5	BADAN KETAHANAN PANGAN	2	304.809.512,19	2	109.809.512,19	-	195.000.000,00	63,97
6	BADAN KARANTINA PERTANIAN	4	1.050.970.370,71	4	1.050.970.370,71	-	-	-
7	SEKERTARIAT JENDERAL	37	8.636.604.438,28	37	8.636.604.438,28	-	-	-
8	DITJEN TANAMAN PANGAN	76	99.583.706.808,50	66	81.437.912.824,09	10	18.145.793.984,41	18,22
9	DITJEN HORTIKULTURA	16	2.405.575.287,61	16	2.405.575.287,61	-	-	-
10	DITJEN PSP	5	16.762.015.454,82	4	15.767.713.704,82	1	994.301.750,00	5,93
11	BPPSDMP	15	1.982.601.059,45	15	1.982.601.059,45	-	-	-
	JUMLAH	**232**	**146.110.391.321,32**	**210**	**123.547.817.778,98**	**22**	**22.562.573.542,34**	15,44

Sumber Data: Bagian DPLHP

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal (Raker Itjen) tahun 2019 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2019, berlokasi di Kinasih Resort and Conference Caringin Bogor, yang dihadiri oleh 296 orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai struktural lingkup Inspektorat Jenderal. Tema yang diusung pada Raker Itjen kali ini adalah **"Go-was Make It Happen, Soliditas Itjentan dalam mengawal pertanian 4.0",** dimana pertanian diharapkan melibatkan digital dalam proses pengembangannya. Kegiatan Raker bertujuan agar seluruh pegawai Itjen dapat mengetahui perkembangan informasi khususnya aplikasi-aplikasi pengawasan yang dibangun oleh Itjen dan menyatukan semangat dan memperkuat hubungan antar pegawai lingkup Itjentan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengadaan diantaranya pengadaan alat pengolah data dan informasi; pengadaan aplikasi elektronik; pengadaan prasarana dan sarana kantor; pengadaan prasarana dan sarana gedung; pengadaan kendaraan bermotor; pembangunan gedung dan renovasi gedung bangunan. Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2019 tertera pada Lampiran 4.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi capaian anggaran dan kegiatan agar kinerja ke depan lebih baik lagi.

Jakarta,
Sekretaris Itjen

Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.
NIP. 197012291991031003

Lampiran 1. Progres perkembangan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT				
			PAGU	REALISASI		TARGET		REALISASI		
			Rp.	Rp.	%	OUTPUT (REKOMENDASI/ LAYANAN)		OUTPUT		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
018.02.03		*PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN*	*94,136,261,000*	*89,993,635,679*	*574*	*1,496*		*1,656*		*110.70*
I	**1755**	**Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP**	**10,330,450,000**	**9,908,777,925**	**95.92**	**349**		**368**		**105.44**
	1755.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	3,392,864,000	3,360,840,987	99.06	144		147		102.08
	1755.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	2,136,528,000	2,094,872,460	98.05	144		153		106
	1755.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta Reviu SAKIP Kementerian	148,632,000	85,875,000	57.78	11	**Rekomendasi**	13	**Rekomendasi**	118
	1755.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta LK Kementerian	673,848,000	643,690,593	95.52	49		54		110
	1755.965	Layanan Audit Internal	3,978,578,000	3,723,498,885	93.59	1	Layanan	1	Layanan	100
II	**1756**	**Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**	**10,222,550,000**	**9,994,543,235**	**97.77**	**311**		**388**		**124.76**
	1756.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	3,401,564,000	3,365,555,234	98.94	130		184		141.54
	1756.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	2,136,528,000	2,111,720,800	98.84	144		167		115.97
	1756.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	73,560,000	66,159,400	89.94	6	**Rekomendasi**	6	**Rekomendasi**	100.00
	1756.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	202,830,000	189,013,301	93.19	30		30		100.00
	1756.965	Layanan Audit Internal	4,408,068,000	4,262,094,500	96.69	1	Layanan	1	Layanan	100.00
III	**1757**	**Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP**	**10,012,170,000**	**9,388,484,370**	**93.77**	**340**		**381**		**112.06**
	1757.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang dan BKP	3,392,864,000	3,077,832,739	90.71	141		171		121.28
	1757.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	2,136,528,000	2,115,206,702	99.00	144	**Rekomendasi**	147	**Rekomendasi**	102.08
	1757.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	100,740,000	84,743,200	84.12	9		10		111.11
	1757.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	293,370,000	278,083,800	94.79	45		52		115.56
	1757.965	Layanan Audit Internal	4,088,668,000	3,832,617,929	93.74	1	Layanan	1	Layanan	100.00
IV	**1758**	**Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian**	**9,949,380,000**	**9,714,768,663**	**97.64**	**352**		**352**		**100.00**
	1758.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	3,450,776,000	3,402,541,142	98.60	153		153		100.00
	1758.011	Rekomendasi Hasil Pengawalan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	2,136,528,000	2,121,451,069	99.29	144	**Rekomendasi**	144	**Rekomendasi**	100.00
	1758.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH, Barantan	81,540,000	78,977,500	96.86	9		9		100.00
	1758.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKA-KL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	271,620,000	244,248,200	89.92	45		45		100.00
	1758.965	Layanan Audit Internal	4,008,916,000	3,867,550,752	96.47	1	Layanan	1	Layanan	100.00
V	**1759**	**Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian**	**10,182,360,000**	**9,559,897,632**	**93.89**	**141**	**Rekomendasi**	**164**	**Rekomendasi**	**116.31**
	1759.010	**Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu**	**4,464,034,000**	**4,248,977,074**	**95.18**	**140**	**Rekomendasi**	**163**	**Rekomendasi**	**116.43**
	1759.965	**Layanan Audit Internal**	**5,718,326,000**	**5,310,920,558**	**92.88**	**1**	**Layanan**	**1**	**Layanan**	
		053 Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian (asessment) Maturitas SPIP	**1,542,524,000**	**1,400,806,125**	**90.81**					
		A Penilaian SPIP	809,695,000	751,023,861						
		B Pembinaan SPIP	44,842,000	42,311,600						
		C Forum SPIP	663,537,000	583,826,664						
		D Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelengaraan SPI Secara Online	24,450,000	23,644,000						
		054 Pembinaan/penilaian mandiri (self asessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	**3,404,230,000**	**3,299,331,234**	**96.92**					
		A Pembinaan Anti Korupsi	760,034,000	756,251,500						
		B Penilaian WBK/WBBM	1,346,518,000	1,302,355,909						
		C Pemasyarakatan Anti Korupsi	163,900,000	157,630,000						
		D Bimtek UPG	51,930,000	41,116,000						
		E Pengelola UPG	8,200,000	8,200,000						
		F Pengelola WBS/DUMAS	8,200,000	-						
		H Pembinaan Anti Korupsi di Sumatera Utara	1,065,448,000	1,033,777,825						
		055 Pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Investigasi	771,572,000	610,783,199	79.16					
VI	**1760**	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal**	**43,439,351,000**	**41,427,163,854**	**95.37**	**3**		**3**		**100.00**
	1760.950	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**	**13,747,441,000**	**12,454,761,150**	**90.60**	**1**	**Layanan**	**1**	**Layanan**	
		051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	2,981,700,000	2,722,752,567						
		052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3,301,440,000	2,961,636,401	89.71					
		053 Pengelolaan Data dan Informasi	1,561,688,000	1,524,996,500	97.65					
		054 Pengelolaan Keuangan	1,017,547,000	922,258,000	90.64					
		057 Pengelolaan Kepegawaian	1,051,370,000	935,247,000	88.96					
		058 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2,738,198,000	2,457,233,250	89.74					
		060 Pelayanan Humas dan Protokol	978,088,000	837,262,432	85.60					
		061 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan RB	117,410,000	93,375,000	79.53					
	1760.951	Layanan Internal	3,000,000,000	2,827,236,199	94.24	1	Layanan	1	Layanan	
	1760.994	Layanan Perkantoran	26,691,910,000	26,145,166,505	97.95	1	Layanan	1	Layanan	
		J U M L A H	**94,136,261,000**	**89,993,635,679**	**95.60**					**110.70**

Lampiran 2. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2019

Uraian Pengadaan			Qty		Pagu		Pemilihan	Penyedia	Kontrak						Sisa	Tgl. SP2D	Nomor
					Satuan	Jumlah	Penyedia		No. Kontrak	Tgl. Mulai	Tgl. Akhir	BAST	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Pagu		SP2D
I.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4						E-Purchasing	PT. Astra International, Tbk TSO	01/PPK-Itjen/003/III/2019	28-Mar-19	25-Jul-19	02-Mei-19				16-Mei-19	191391302024753
	1.	Toyota New Kijang Innova 2,4 G M/T Diesel	1	unit	317.100.000	317.100.000							324.260.000	324.260.000	(7.160.000)		
	2.	Toyota New Kijang Innova 2,0 G A/T Lux	3	unit	317.100.000	951.300.000							314.670.000	944.010.000	7.290.000		
	Jumlah I		4	Unit		1.268.400.000								1.268.270.000	130.000		
II.	Pengembangan SIMWAS																
	1.	Pengembangan Aplikasi SIMWAS	1	paket	100.000.000	100.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Astirindo Jaya	01/PPK-Itjen/008/IX/2019	11-Sep-19	09-Des-19		94.505.400	94.505.400	5.494.600	12-Des-19	191391302091669
	2.	Pengembangan Aplikasi e-ATT	1	paket	100.000.000	100.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Aplindo	01/PPK-Itjen/007/VII/2019	17-Jul-19	29-Okt-19	25-Okt-19	99.000.000	99.000.000	1.000.000	30-Okt-19	191391303049478
	3.	Pengembangan Aplikasi e-Audit	1	paket	70.000.000	70.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Tanah Air Bagus	01/PPK-Itjen/013/X/2019	15-Okt-19	13-Des-19		62.150.000	62.150.000	7.850.000	16-Des-19	191391302095195
	4.	Pengembangan Aplikasi e-Pengawalan	1	paket	50.000.000	50.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Loent Artha Indonesia	01/PPK-Itjen/011/X/2019	14-Okt-19	12-Des-19		49.016.000	49.016.000	984.000	16-Des-19	191391302095409
	5.	Pengembangan Aplikasi e-Reviu LK	1	paket	50.000.000	50.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Nanjung Regional Information System	01/PPK-Itjen/015/XI/2019	07-Nov-19	10-Des-19				50.000.000		Tidak terealisasi
	6.	Pengembangan Aplikasi e-Reviu RKA-K/L	1	paket	50.000.000	50.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Astech Alus T	01/PPK-Itjen/017/XI/2019	19-Nov-19	13-Des-19		29.150.000	29.150.000	20.850.000	18-Des-19	191391302099545
	7.	Pengembangan Aplikasi e-Evaluasi	1	paket	30.000.000	30.000.000	Pengadaan Langsung	PT. Aplindo	01/PPK-Itjen/016/XI/2019	18-Nov-19	12-Des-19		29.040.000	29.040.000	960.000	16-Des-19	191391303068743
	8.	Aplikasi Dupak	1	paket	50.000.000	50.000.000								-	50.000.000		Tidak terealisasi
	Jumlah II		8	paket		500.000.000								362.861.400	137.138.600		

III.	**Pengadaan Alat Pengolah Data**					E-Purchasing	PT. Myacico Global Indonesia	01/PPK-Itjen/004/IV/2019	01-Apr-19	30-Apr-19	26-Apr-19				06-Mei-19	191391303012170
1.	Laptop dan Office	28	unit	18.000.000	504.000.000							18.000.000	504.000.000	-		
2.	Scanner	7	unit	5.130.000	35.910.000							5.128.000	35.896.000	14.000		
3.	Printer Warna	5	unit	1.770.800	8.854.000							1.715.000	8.575.000	279.000		
4.	Printer	9	unit	2.000.000	18.000.000							1.800.000	16.200.000	1.800.000		
	Jumlah III	49	unit		566.764.000								564.671.000	2.093.000		
IV.	**Pengadaan Alat Pengolah Data**					Pengadaan Langsung	PT. Sumadya Bhumi	KW0060525	12-Sep-19						19-Sep-19	191391303039619
1.	Tablet Untuk Kegiatan Kehumasan	1	unit	5.500.000	5.500.000		Kumelar	Kuitansi				4.510.000	4.510.000	990.000		
2.	Laptop dan Software Multimedia untuk Kehumasan	1	unit	38.000.000	38.000.000							36.465.000	36.465.000	1.535.000		
	Jumlah IV	2	unit		43.500.000								40.975.000	2.525.000		
V.	**Pengadaan Alat Pengolah Data**					E-Purchasing	PT. Bhinneka MentariDimensi	KWI/SO01219 1169231820/	09-Des-19						13-Des-19	191391303067213
1.	Printer Dot Matrik A4	1	unit	3.700.000	3.700.000			PKM-P1911-2107940				2.799.500	2.799.500	900.500		
2.	Printer Dot Matrik A3	1	unit	10.200.000	10.200.000			Kuitansi				8.232.000	8.232.000	1.968.000		
3.	Printer Laserjet B/W	1	unit	13.000.000	13.000.000							12.729.000	12.729.000	271.000		
	Jumlah V	3	unit		26.900.000								23.760.500	3.139.500		
								393/SB-Kuit/12/19								
VI.	**1. Laptop Pimpinan**	1	unit	30.000.000	30.000.000	Pengadaan Langsung	Cv. Sinar Buana	Kuitansi	16-Des-19			27.770.000	27.770.000	2.230.000	18-Des-19	191391302101601
	Jumlah VI	1	unit		30.000.000								27.770.000	2.230.000		
VII.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					E-Purchasing	PT. Bhinneka MentariDimensi	01/PPK-Itjen/001/III/2019	28-Mar-19	26-Apr-19	25-Apr-19				30-Apr-19	191391303011280
1.	Mesin Penghancur	6	unit	3.500.000	21.000.000							3.340.000	20.040.000	960.000		
2.	Mesin Fotocopy	1	unit	60.000.000	60.000.000							56.296.800	56.296.800	3.703.200		
3.	Kamera Mirrorless	2	unit	7.900.000	15.800.000							7.750.000	15.500.000	300.000		
	Jumlah VII	9	unit		96.800.000								91.836.800	4.963.200		

VIII.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					E-Purchasing	PT. Datascrip	01/PPK-Itjen/002/III/2019	28-Mar-19	26-Apr-19	25-Apr-19				02-Mei-19	191391303011453
1.	Lemari Besi	11	unit	3.600.000	39.600.000							3.600.000	39.600.000	-		
2.	Filling Cabinet	11	unit	3.192.000	35.112.000							3.192.000	35.112.000	-		
3.	Lemari Besi Kaca	11	unit	4.500.000	49.500.000							4.237.000	46.607.000	2.893.000		
4.	Dispenser	6	unit	2.500.000	15.000.000							2.475.000	14.850.000	150.000		
	Jumlah VIII	39	unit		139.212.000								136.169.000	3.043.000		
IX.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	CV. Sembilan Benua	02/PPK-Itjen/005/V/2019	07-Mei-19	24-Mei-19	20-Mei-19				23-Mei-19	191391303016459
1.	Kursi Rapat	45	unit	1.340.000	60.300.000							1.336.500	60.142.500	157.500		
	Jumlah IX	45	Unit		60.300.000								60.142.500	157.500		
X.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	PT.Sumadya	KW0060519	26-Jun-19						01-Jul-19	191391303021971
1.	Drone	1	unit	35.000.000	35.000.000		Bhumi Kumelar	Kuitansi				32.000.000	32.000.000	3.000.000		
	Jumlah X	1	Unit		35.000.000								32.000.000	3.000.000		
XI.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	CV. Putra Amiras Jaya	051/Kuit/PAJ/10/2019	24-Okt-19						28-Okt-19	191391302070127
1.	Meja Tamu	1	unit	4.800.000	4.800.000			Kuitansi					4.400.000	400.000		
2.	Mesin Jilid LHP	1	unit	19.024.000	19.024.000								17.380.000	1.644.000		
3.	Mesin Laminating A3	1	unit	14.000.000	14.000.000								13.970.000	30.000		
4.	Mesin Hitung Uang	1	unit	3.550.000	3.550.000								3.520.000	30.000		
	Jumlah XI	4	Unit		41.374.000								39.270.000	2.104.000		
XII.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	PT. Indogus Mitra	087/IMS-Kuit/10/2019	25-Okt-19						28-Okt-19	191391302070143
1.	AC Split 2 PK	1	unit	10.000.000	10.000.000		Sukses	Kuitansi				9.669.000	9.669.000	331.000		
2.	AC Split 2 PK	1	unit	8.600.000	8.600.000							8.558.000	8.558.000	42.000		
3.	TV LED 43 Inch	1	unit	7.800.000	7.800.000							7.755.000	7.755.000	45.000		
4.	TV LED 32 Inch	2	unit	2.800.000	5.600.000							2.475.000	4.950.000	650.000		
5.	TV LED 24 Inch	2	unit	1.850.000	3.700.000							1.606.000	3.212.000	488.000		
6.	Bracket TV Standing	1	unit	2.450.000	2.450.000							2.442.000	2.442.000	8.000		
	Jumlah XII	8	Unit		38.150.000								36.586.000	1.564.000		

XIII.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	CV. Sinar Buana	269/SB-Kuit/9/19	17-Sep-19						23-Sep-19	191391302057653
1.	Trolley Makanan	3	unit	2.200.000	6.600.000			Kuitansi				1.556.000	4.668.000	1.932.000		
2.	Watter Boiler	1	unit	1.500.000	1.500.000							1.391.000	1.391.000	109.000		
3.	Watter Boiler	3	unit	1.500.000	4.500.000							1.390.000	4.170.000	330.000		
4.	Kompor Listrik	1	unit	3.000.000	3.000.000							2.150.000	2.150.000	850.000		
5.	Trolley Barang	2	unit	3.000.000	6.000.000							2.100.000	4.200.000	1.800.000		
	Jumlah XIII	10	Unit		21.600.000								16.579.000	5.021.000		
XIV.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	PT. Indo Akses Teknologi	IAT-P1511-002	15-Nov-19						20-Nov-19	191391303056599
1.	Mesin Absensi	5	unit	10.000.000	50.000.000			Kuitansi				9.570.000	47.850.000	2.150.000		
	Jumlah XIV	5	Unit		50.000.000								47.850.000	2.150.000		
XV.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					Pengadaan Langsung	CV. Tiga Putra Jaya	67/TPJ-Kuit/12/2019	12-Des-19						18-Des-19	191391301081583
1.	Digital Multi Effect	1	unit	4.300.000	4.300.000			Kuitansi				4.250.000	4.250.000	50.000		
2.	Analog Mixer Console	1	unit	8.350.000	8.350.000							8.200.000	8.200.000	150.000		
3.	Layar	2	unit	3.000.000	6.000.000							2.980.000	5.960.000	40.000		
	Jumlah XV	4	Unit		18.650.000								18.410.000	240.000		
XVI.	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**														20-Des-19	191391302101601
1.	Meja Taman	2	unit	2.500.000	5.000.000	Pengadaan Langsung	CV. Sinar Buana	323/SB-Kuit/11/19	19-Nov-19			2.500.000	5.000.000	-		
2.	Kursi Taman	10	unit	1.100.000	11.000.000			Kuitansi				1.100.000	11.000.000	-		
3.	Kursi dan Meja Taman	1	unit	3.500.000	3.500.000							3.100.000	3.100.000	400.000		
4.	Coffe Maker	1	unit	4.500.000	4.500.000							4.500.000	4.500.000	-		
5.	Rak Coffe Maker	1	unit	1.850.000	1.850.000							1.730.000	1.730.000	120.000		
	Jumlah XVI	15	Unit		25.850.000								25.330.000	520.000		
XVII	**Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**					E-Purchasing	PT. Datascrip	PSINV/19-161308	06-Des-19						11-Des-19	191391303064777
1.	Meja Rapat	15	unit	2.500.000	37.500.000			Kuitansi				2.317.000	34.755.000	2.745.000		
	Jumlah XVII	15	Unit		37.500.000								34.755.000	2.745.000		
	TOTAL				3.000.000.000								2.827.236.200	172.763.800		

Sumber Data: dari Bagian Keuangan & Perlangkapan